

**PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SLEMAN
DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

Daimatun Nafiah

ASMI DESANTA Yogyakarta

Email: daimanafiah@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the role of the Department of Communication and Informatics of Sleman Regency in supporting administrative digitalization within the Sleman Regency Government. The research design used is descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation studies. The results of this study conclude that: 1). The Department of Communication and Informatics of Sleman Regency plays an important role in supporting administrative digitalization within the Sleman Regency Government through the provision of information technology infrastructure, the development of electronic office applications, and training to enhance the competence of government personnel. In addition, the Department also ensures data and network security and promotes the implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE), making administrative processes more efficient, transparent, and accountable. 2). Several systems and applications are utilized to support administrative digitalization, including E-Office (correspondence), Lapor Sleman (a local innovation application), SP4N Lapor, SINP (Attendance Information System), Regional Asset Inventory Information System, SIPD (Regional Government Information System), the official Sleman Regency Government Website, SMS Gateway, various social media platforms, and Padukuhan Wi-Fi networks. 3). Some obstacles in improving the effectiveness of administrative digitalization include limited human resources, technical challenges such as system disruptions or suboptimal integration between applications, uneven technological infrastructure particularly in remote areas with limited network access and insufficient adaptation to a digital work culture. 4). To overcome these challenges, several efforts have been made, including capacity building for human resources, providing direct technical assistance to government offices (OPD) facing difficulties in using digital applications, improving application systems to make them more stable and integrated through the SPBE portal, developing network infrastructure in underserved areas, and fostering a digital work culture that is adaptive and open to change.

Keyword: *Administrative digitalization; Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kerja organisasi, termasuk instansi pemerintah. Digitalisasi administrasi menjadi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Administrasi konvensional (*manual/paper based*) terbukti memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, sulit untuk dipantau, dan kurang transparan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi layanan publik. Salah satu bukti nyata adalah peluncuran aplikasi *Sleman Digital* pada November 2024. Aplikasi ini dirancang sebagai pusat layanan publik terpadu agar masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan aspirasi dan memakai layanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan transparan melalui satu platform digital (kominfo.slemankab.go.id, 2024). Dalam bidang kearsipan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mengadakan sosialisasi *e-Arsip* bagi seluruh perangkat daerah dan melakukan transformasi kearsipan di era digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan pemerintahan elektronik (SPBE) menjadi acuan formal; Sleman meraih evaluasi dengan predikat “Memuaskan” pada SPBE yang dievaluasi oleh Kementerian PAN & RB pada tahun 2023 dengan nilai 4,29. (Betty, 2024).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman memegang peran strategis sebagai pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Dari hasil survei “Indeks Kepuasan Masyarakat” (IKM) Semester 1 Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman memperoleh nilai 88,39. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas, tetapi belum menunjukkan bahwa semua proses administrasi internal (perkantoran) sudah terdigitalisasi secara menyeluruh (Diskominfo, 2025).

Mengingat bahwa Sleman telah meluncurkan Sleman Digital, ada momentum yang tepat untuk meneliti sampai sejauh mana peran Diskominfo berkaitan dengan administrasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi konkret guna meningkatkan penyelenggaraan administrasi yang lebih efektif dan efisien, memperkuat tata kelola pemerintahan (*governance*), dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian

untuk mengetahui sejauh mana peran Diskominfo dalam mendukung digitalisasi administrasi, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam Mendukung Digitalisasi Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk mengkaji peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Peneliti mengumpulkan data mendalam dari informan terpilih untuk memahami proses digitalisasi administrasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan secara objektif mengenai peran Diskominfo dalam mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan digitalisasi administrasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses dan implementasi digitalisasi administrasi di Diskominfo Kabupaten Sleman.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data di lapangan, kemudian data yang telah terkumpul dikelompokkan dan direduksi sehingga bisa ditentukan hal-hal yang dianggap relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Pembahasan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Diskominfo Sleman berperan penting dalam mengembangkan sistem informasi, pengelolaan data, penyebaran informasi publik, serta mendukung transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah daerah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang pejabat yang menyatakan bahwa :

“Diskominfo) Kabupaten Sleman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan sistem informasi, pengelolaan data, penyebaran informasi publik, serta mendukung transparansi dan keterbukaan informasi”.

Selain itu, Diskominfo Sleman juga bertanggung jawab dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman, termasuk jaringan internet, aplikasi layanan publik, dan keamanan siber. Dengan dukungan SDM yang kompeten, Diskominfo berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam Digitalisasi Administrasi

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi manajemen dan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh bagaimana kegiatan administrasi dikelola dengan baik. Administrasi merupakan pusat koordinasi berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, komunikasi, dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa administrasi yang tertata, kegiatan organisasi akan berjalan kurang terarah, lamban, dan rawan kesalahan. Peran administrasi semakin penting di era digital saat ini, di mana arus informasi harus diolah secara cepat, akurat, dan aman. Peran Diskominfo Sleman berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat adalah sebagai berikut :

“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman berperan penting dalam mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan aplikasi perkantoran berbasis elektronik, serta pelatihan peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman juga memastikan keamanan data dan jaringan serta mendorong penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel”.

Diskominfo Kabupaten Sleman berfungsi sebagai penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung digitalisasi administrasi. Peran ini mencakup penyediaan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang stabil, server untuk penyimpanan data, serta aplikasi pendukung seperti *e-Office*, SINP (Sistem Informasi Presensi)), SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), dan lain-lain. Dengan tersedianya fasilitas ini, proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini seperti hasil wawancara dengan seorang pejabat yang menyatakan bahwa :

“Diskominfo Kabupaten Sleman sebagai penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung digitalisasi administrasi. Hal tersebut mencakup penyediaan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang stabil, server untuk penyimpanan data, serta aplikasi pendukung seperti e-Office, Sistem Informasi Presensi (SINP), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan lain-lain”.

Selain menyediakan infrastruktur, Diskominfo juga berperan aktif dalam mendorong implementasi digitalisasi. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan SDM agar pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Diskominfo menjadi motor penggerak perubahan budaya kerja dari sistem manual ke sistem digital, sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memanfaatkan aplikasi dan platform digital yang disediakan.

Diskominfo tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga berperan sebagai pengendali melalui penyusunan kebijakan, pedoman, dan SOP terkait pemanfaatan teknologi informasi. Standar Operasional Prosedur berfungsi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proses digitalisasi, serta memastikan bahwa tujuan digitalisasi tercapai. Keberadaan SOP memiliki beberapa manfaat penting, antara lain memandu pelaksanaan digitalisasi. SOP memberikan langkah-langkah yang terstruktur dan terukur untuk setiap tahapan digitalisasi, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Berdasarkan penelusuran, SOP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman terdapat 33 SOP meliputi : Sekretariat (16 SOP), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (8 SOP), Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi (4 SOP), Bidang Layanan *E government* dan Persandian (5 SOP). (<https://kominfo.slemankab.go.id/standar-operasional-prosedur-sop/>).

Dengan adanya SOP akan mempermudah pengoperasian sistem dan peralatan, hal ini karena SOP berisi panduan teknis untuk penggunaan sistem dan peralatan digitalisasi, sehingga meminimalkan kesalahan dan optimalisasi kinerjanya. SOP juga menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama proses digitalisasi, sehingga digitalisasi dapat terus berjalan tanpa hambatan. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan sesuai standar, aman dari ancaman siber, dan mendukung tercapainya target kinerja pemerintah daerah.

Sistem dan Aplikasi yang Digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam mendukung Digitalisasi Administrasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintah melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan publik. Digitalisasi administrasi menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman berperan penting dalam menyediakan sistem dan aplikasi yang mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai aplikasi dirancang untuk mengintegrasikan proses kerja, memudahkan pengelolaan data, serta mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Keberadaan infrastruktur digital ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya administrasi yang modern dan terintegrasi. Adapun sistem dan aplikasi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam digitalisasi administrasi seperti hasil wawancara dengan salah seorang pejabat yang menyatakan bahwa :

“Ada beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dalam mendukung digitalisasi administrasi yaitu E-Office (persuratan), Lapor Sleman (aplikasi inovasi lokal), SP4N Lapor, SINP (Sistem Informasi Presensi), , Sistem Informasi Inventarisasi Aset Pemda Sleman, SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), Website Pemkab, SMS Gateway dan beberapa media sosial serta Wifi Padukuhan”

Salah satu aplikasi utama yang digunakan pada **E-Office**, adalah SIMARDA yakni aplikasi untuk mengelola persuratan dan arsip secara digital. Melalui E-Office, kegiatan administrasi seperti pembuatan, pengiriman, disposisi, dan tindak lanjut surat serta pengelolaan arsip dapat dilakukan secara elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan digital. Aplikasi ini memudahkan pelacakan status surat dan disposisi, mempercepat proses administrasi, serta mendukung penerapan konsep *paperless office*. Dalam bidang pelayanan publik, Diskominfo Sleman mengelola berbagai kanal pengaduan masyarakat, seperti **Lapor Sleman** yang merupakan pengembangan **aplikasi inovasi lokal** dan **SP4N-LAPOR** (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional). Kedua layanan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun aspirasi secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Diskominfo, masyarakat semakin aktif menggunakan kanal tersebut untuk melaporkan permasalahan pelayanan publik, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Permasalahan tersebut misalnya,

pengaduan tentang jalan berlubang, saluran air yang tersumbat, penerangan jalan, pengurusan surat izin usaha yang lambat, fasilitas puskesmas yang tidak memadai dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga menerapkan **Sistem Informasi Presensi (SINP)** bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-PNS. Sistem ini mendukung pencatatan kehadiran secara digital dan terintegrasi, sehingga data kehadiran dapat dimonitor dengan lebih akurat dan efisien. Untuk memperkuat komunikasi publik, Diskominfo Sleman juga memanfaatkan sistem **Pengelolaan SMS Gateway**, yang berfungsi sebagai saluran informasi masyarakat melalui pesan singkat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perizinan, kesehatan, kependudukan, kebencanaan, dan layanan publik lainnya secara cepat. Dalam pengelolaan aset daerah, Diskominfo Sleman mengembangkan **Sistem Informasi Inventarisasi Aset Pemda Sleman** yang dapat diakses secara daring melalui laman *sensusaset.slemankab.go.id*. Sistem ini memungkinkan pendataan, pemantauan, dan pelaporan aset daerah dilakukan secara *real time* dan lebih akurat, sehingga mendukung efisiensi serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

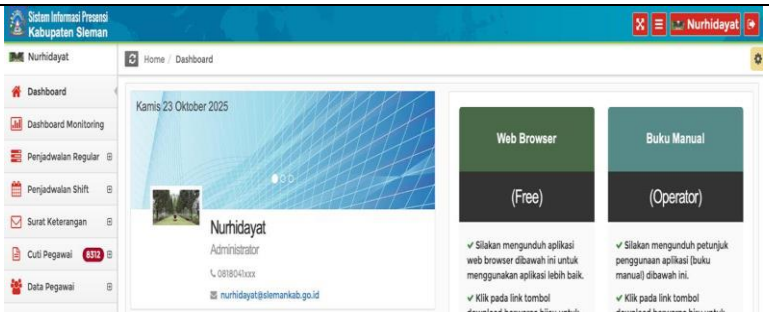
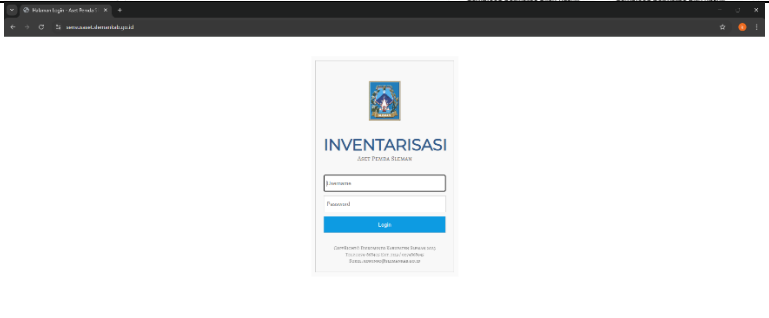
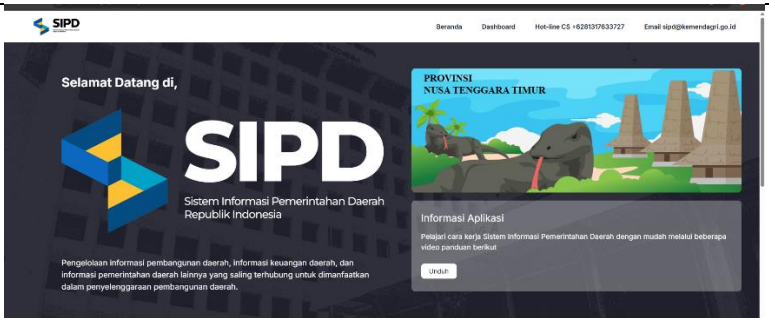
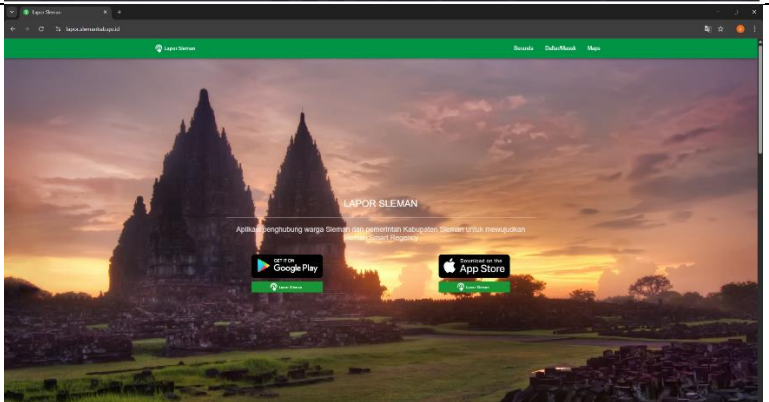
Selanjutnya, dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah, diterapkan **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)** yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD mencakup proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Melalui SIPD, administrasi keuangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur TIK, program **Wi-Fi Padukuhan** juga menjadi bagian yang dikelola oleh Diskominfo Sleman. Melalui program ini, pemerintah menyediakan akses Wi-Fi gratis di tingkat padukuhan (desa) untuk mendukung pemerataan akses internet bagi masyarakat. Meskipun bukan aplikasi administrasi secara langsung, program ini menjadi fondasi utama dalam memperluas jangkauan layanan digital pemerintah daerah hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, Diskominfo Sleman juga mengelola **website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman** (<https://slemankab.go.id>). Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi resmi pemerintah seperti berita terkini, agenda kegiatan, dokumen publik, serta layanan daring. Website ini menjadi sarana utama dalam mewujudkan transparansi informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Selain website, media sosial resmi Pemkab Sleman juga memegang peranan penting dalam memperluas jangkauan informasi publik. Akun Instagram (@kominfo_sleman), Facebook (diskominfo.sleman), dan Twitter

(@kominfo_sleman) digunakan secara aktif untuk menyampaikan berita, pengumuman, serta merespons pertanyaan atau keluhan masyarakat. Media sosial menjadi kanal komunikasi interaktif yang efektif untuk membangun partisipasi publik dan memperkuat citra positif pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penerapan berbagai sistem dan aplikasi digital tersebut menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Sleman telah berperan aktif sebagai fasilitator, penggerak, dan pengendali utama digitalisasi administrasi pemerintahan. Dampak positif dari implementasi ini antara lain peningkatan efisiensi waktu dan biaya, penerapan administrasi tanpa kertas, transparansi yang lebih baik, serta meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat dalam layanan publik. Dengan dukungan infrastruktur yang terus diperbarui dan komitmen seluruh aparatur pemerintah, digitalisasi administrasi di Kabupaten Sleman semakin mendekati terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) yang responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tabel 1. Sistem dan Aplikasi yang Digunakan **Diskominfo Sleman**

a) Aplikasi surat menyurat digital	
b) Lapor Sleman	
c) SP4N Lapor	

d) Sistem Informasi Presensi (SINP)	
e) Sistem Informasi Inventarisasi Aset Pemda Sleman	
f) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	
g) Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sleman	



Sumber : Dokumentasi penulis

Kendala dalam Meningkatkan Efektivitas Digitalisasi Administrasi

Pelaksanaan digitalisasi administrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan, terutama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun demikian, proses implementasi di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala yang masih perlu mendapatkan perhatian. Hal ini seperti hasil wawancara dengan salah seorang pejabat yang menyatakan bahwa :

“Beberapa kendala dalam meningkatkan efektivitas digitalisasi administrasi antara lain : keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Kendala teknis seperti gangguan sistem atau integrasi antar aplikasi yang belum optimal, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya merata, yaitu keterbatasan infrastruktur jaringan yang belum dijangkau di medan sulit, serta kurangnya adaptasi dengan budaya kerja digital”.

Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua pegawai di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki kemampuan dan literasi digital yang memadai. Masih terdapat pegawai yang belum terbiasa menggunakan berbagai aplikasi digital, seperti *e-office*, e-surat, dan tanda tangan elektronik. Selain itu, jumlah tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi juga masih terbatas, sehingga penanganan masalah teknis sering kali menumpuk pada tim kecil di bidang *e-Government* Diskominfo.

Selanjutnya, integrasi antar-aplikasi dan sistem data juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini masih terdapat banyak aplikasi yang berjalan secara terpisah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa konektivitas yang baik. Akibatnya, proses pertukaran data antar-sistem belum optimal dan sering kali memerlukan input ulang. Kendala berikutnya berkaitan dengan infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya merata.

Meskipun jaringan internet di Kabupaten Sleman sudah cukup luas, namun masih ditemukan wilayah terutama di daerah pinggiran yang mengalami keterbatasan akses dan kestabilan jaringan. Misalnya di daerah Lereng Gunung Merapi, terutama Dusun Tunggularum, Desa Wonokerto, Turi ; daerah Moyudan (Sleman Barat) ; dan beberapa padukuhan yang secara geografis berada di lereng atau perbukitan, misalnya Kalurahan Girikerto (Turi) dan Purwobinangun (Pakem). Kapasitas server dan perangkat keras yang digunakan juga masih perlu ditingkatkan untuk menampung beban data dan aplikasi yang terus berkembang. Kendala lainnya bersumber dari kurangnya adaptasi budaya kerja digital. Sebagian pegawai masih memiliki kebiasaan bekerja secara manual karena merasa lebih cepat dan nyaman dengan cara konvensional. Perubahan sistem kerja berbasis elektronik memerlukan waktu, pendampingan, dan komitmen bersama dari pimpinan hingga staf pelaksana.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Digitalisasi Administrasi

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi digitalisasi administrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman telah melakukan sejumlah langkah strategis dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan agar seluruh proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini seperti hasil wawancara dengan salah seorang pejabat yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengatasi kendala dilakukan hal-hal antara lain : peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pendampingan teknis langsung ke OPD yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi digital, perbaikan sistem aplikasi agar lebih stabil dan terintegrasi melalui portal SPBE, pembangunan infrastruktur jaringan di daerah yang belum terjangkau, serta serta penumbuhan budaya kerja digital yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan”.

Langkah pertama yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Diskominfo secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan literasi digital bagi pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala, umumnya dua hingga tiga kali dalam satu triwulan, dengan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti penggunaan aplikasi *e-office*, *SP4N Laporan*, tanda tangan elektronik, dan pengelolaan dokumen digital. Selain itu, Diskominfo Sleman

juga melakukan pendampingan teknis langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih mengalami kesulitan dalam penerapan sistem digital.

Upaya berikutnya adalah penguatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi. Diskominfo Sleman secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas server, *bandwidth* internet, dan jaringan intranet antar-OPD. Selain itu, dilakukan perluasan akses internet hingga ke kantor-kantor kalurahan agar seluruh unit kerja pemerintah daerah memiliki akses yang setara terhadap layanan digital. Penguatan infrastruktur ini menjadi pondasi penting dalam memastikan keberlanjutan layanan administrasi digital dan konektivitas antarsistem di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam hal integrasi dan sinkronisasi sistem aplikasi, Diskominfo Sleman mendorong penerapan sistem yang saling terhubung melalui portal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) terpadu. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk menggunakan aplikasi yang telah distandarkan oleh pemerintah daerah agar data dapat terintegrasi secara otomatis tanpa input berulang. Diskominfo Sleman juga mengembangkan *dashboard* data dan layanan terpadu yang memungkinkan pimpinan daerah memantau kinerja dan aktivitas digital secara *real time*, serta meningkatkan koordinasi antar-unit kerja.

Dalam konteks perubahan budaya kerja, Diskominfo berperan aktif membangun komitmen dan kesadaran digital di kalangan pegawai dalam menggunakan aplikasi digital dalam setiap proses administrasi, seperti penggunaan *e-office* untuk surat-menyurat dan laporan kinerja. Dengan demikian, budaya kerja berbasis elektronik dapat tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan efektivitas digitalisasi administrasi di Kabupaten Sleman juga dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu langkah utama adalah pengembangan serta penyempurnaan aplikasi administrasi agar semakin sesuai dengan kebutuhan tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar-OPD juga dilakukan untuk memastikan penerapan sistem digitalisasi berjalan secara terpadu dan efisien. Upaya monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh tim teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, yang meliputi pemantauan jaringan, aplikasi, serta *website* yang digunakan. Untuk menjamin keamanan sistem, diterapkan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan siber melalui pelaksanaan uji keamanan sistem secara rutin.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman memiliki peran strategis dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Sleman. Peran tersebut sebagai fasilitator, penggerak, dan pengendali. Penerapan sistem dan aplikasi digital seperti *e-Office*, SP4N-LAPOR, Lapor Sleman, SINP, Sistem Informasi Aset Pemda Sleman, SIPD, *Website* Resmi Kab Sleman, *Wifi* Padukuhan, *SMS Gateway* serta berbagai media sosial telah meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas layanan publik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan SDM, kendala teknis seperti gangguan sistem atau integrasi antar aplikasi yang belum optimal, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya merata, yaitu keterbatasan infrastruktur jaringan yang belum dijangkau di medan sulit, serta kurangnya adaptasi dengan budaya kerja digital.

Meskipun demikian, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pendampingan teknis ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi digital, perbaikan sistem aplikasi agar lebih stabil dan terintegrasi melalui portal SPBE, pembangunan infrastruktur jaringan di daerah yang belum terjangkau, serta penumbuhan budaya kerja digital yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan.

Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan digitalisasi administrasi di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, penulis memberikan rekomendasi hal-hal sebagai berikut : diperlukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, terutama bagi pegawai di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tingkat pemanfaatan teknologinya masih rendah. Selanjutnya, infrastruktur jaringan juga perlu diperluas dan diperkuat. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman perlu menambah kapasitas server, memperluas dan memperkuat jangkauan internet hingga wilayah terpencil. Perubahan budaya kerja menuju sistem *paperless* perlu ditingkatkan. Pimpinan instansi diharapkan menjadi teladan dalam penggunaan aplikasi digital dan mendorong budaya kerja *paperless* di lingkungan kerja masing-masing. Selain itu, alokasi anggaran perlu diarahkan tidak hanya pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga pada pengembangan sistem, pelatihan SDM, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, dan instansi pusat untuk mempercepat inovasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Pitoyo Widhi. 2015. *Digitalisasi dan Alih Media*. Malang: Universitas Bramelati
- Betty, 2024, *Sosialisasi E-Arsip Perangkat Daerah Wujudkan Digitalisasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Sleman*. <https://perpusarsip.slemankab.go.id/>
- Choirunnissa, N. F., & Oktarina, N. 2025. *Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Kantor*. Bookchapter Administrasi Perkantoran, 1, 77-95.
- Halimah, Mas, 2014, *Konsep dan Ruang Lingkup Administrasi Perkantoran*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Haryadi, Hendi. 2009, *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staf*. Jakarta : Visimedia
- INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Ismail, M. R., Saputra, T. S., Sari, A. S., & Wulandari, S. (2025) *Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Administrasi (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Palembang Bagian Staff Umum dan Kepegawaian)*. vol, 3, 1065-1069.
- Kominfo, 2024, *Wujudkan Digitalisasi Pusat Layanan Publik, Pemkab Sleman Luncurkan Sleman Digital*. <https://kominfo.slemankab.go.id>
- Nuraida, Ida. 2014, *Manajemen Administrasi Perkantoran (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Kanisius,
- Souisa, S. M. H., & Supardal, S. 2022. *Implementasi E-Government Pada Sistem Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah (Sisminkada) Daerah Istimewa Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19*. Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 6(2), 131-154.
- Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Perss
- Wijayanti, Diah Sutha.2018 *Administrasi Perkantoran: Cara Mudah Memahami*.Sidoarjo : Indomedia Pustaka
- Yungkul, Y. 2025. *Optimalisasi Sistem Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan di Era Digital*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(7), 3103–3111. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8431>